



KEBIJAKAN PUBLIK

Kebijakan Pangan

TIP - FTP - UB

PENGERTIAN, JENIS-JENIS, DAN TINGKAT-TINGKAT KEBIJAKAN PUBLIK

1. Pengertian Kebijakan Publik

a. Thomas R. Dye

Kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu

b. James E. Anderson

Kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat pejabat pemerintah.

c. David Easton

Kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara sah kepada seluruh anggota masyarakat.

Kesimpulan

- a. Kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah.
- b. Kebijakan publik baik untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu itu mempunyai tujuan tertentu.
- c. Kebijakan publik ditunjukkan untuk kepentingan masyarakat.

2. Jenis-jenis Kebijakan Publik

James E. Anderson (1970) mengelompokkan jenis-jenis kebijakan publik sebagai berikut :

a. Substantive and Procedural Policies.

Substantive Policy

Suatu kebijakan dilihat dari substansi masalah yang dihadapi oleh pemerintah.

Procedural Policy

Suatu kebijakan dilihat dari pihak-pihak yang terlibat dalam perumusannya (Policy Stakeholders).

b. Distributive, Redistributive, and Regulatory Policies

Distributive Policy :

Suatu kebijakan yang mengatur tentang pemberian pelayanan/keuntungan kepada individu-individu, kelompok-kelompok, atau perusahaan-perusahaan.

Redistributive Policy :

Suatu kebijakan yang mengatur tentang pemindahan alokasi kekayaan, kepemilikan, atau hak-hak.

Regulatory Policy :

Suatu kebijakan yang mengatur tentang pembatasan/pelarangan terhadap perbuatan/ tindakan.

C. Material Policy

Suatu kebijakan yang mengatur tentang pengalokasian/penyediaan sumber-sumber material yang nyata bagi penerimanya.

d. Public Goods and Private Goods Policies

Public Goods Policy

Suatu kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barang-barang/pelayanan-pelayanan oleh pemerintah, untuk kepentingan orang banyak.

Private Goods Policy

Suatu kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barang-barang/pelayanan-pelayanan oleh pihak swasta, untuk kepentingan individu-individu (perorangan) di pasar bebas, dengan imbalan biaya tertentu.

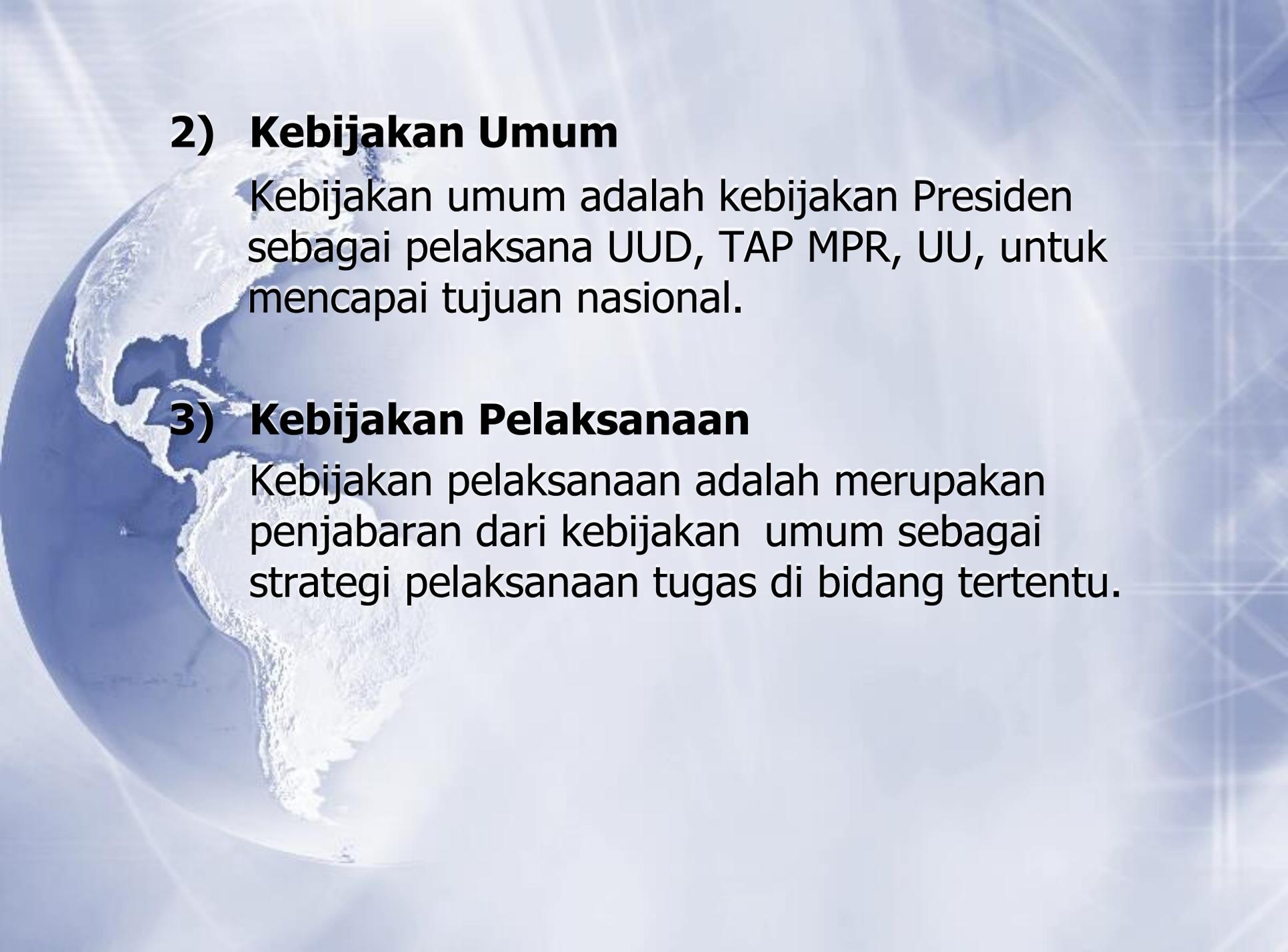
3. Tingkat-Tingkat Kebijakan Publik

Mengenai tingkat-tingkat kebijakan publik ini, Lembaga Administrasi Negara (1997), mengemukakan sebagai berikut :

a. Lingkup Nasional

1) Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional adalah kebijakan negara yang bersifat fundamental dan strategis dalam pencapaian tujuan nasional/negara sebagaimana tertera dalam pembukaan UUD 1945

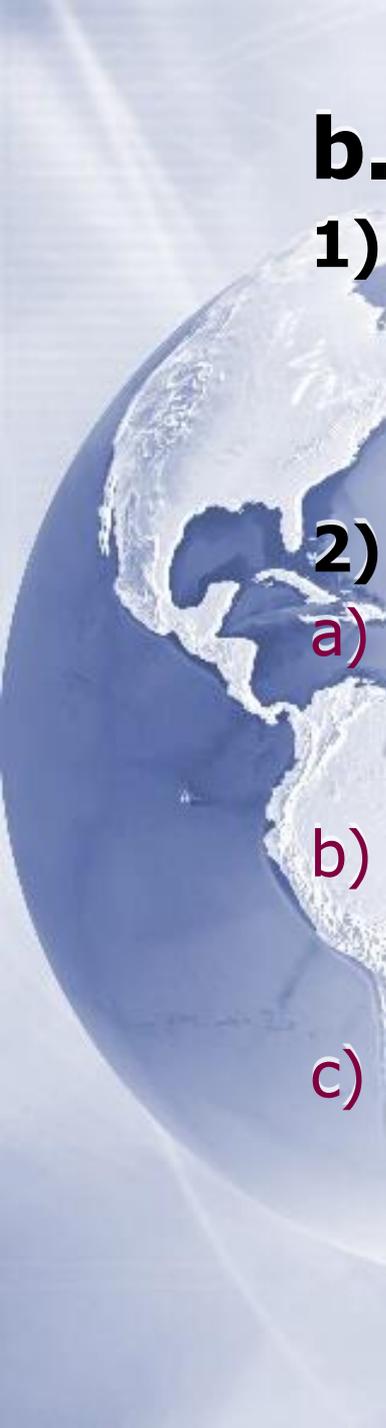


2) Kebijakan Umum

Kebijakan umum adalah kebijakan Presiden sebagai pelaksana UUD, TAP MPR, UU, untuk mencapai tujuan nasional.

3) Kebijakan Pelaksanaan

Kebijakan pelaksanaan adalah merupakan penjabaran dari kebijakan umum sebagai strategi pelaksanaan tugas di bidang tertentu.



b. Lingkup Wilayah Daerah

1) Kebijakan umum pada lingkup Daerah

kebijakan pemerintah daerah sebagai pelaksana azas desentralisasi dalam rangka mengatur urusan Rumah Tangga Daerah

2) Kebijakan Pelaksanaan.

- a) Kebijakan pelaksanaan dalam rangka desentralisasi merupakan realisasi pelaksanaan PERDA
- b) Kebijakan pelaksanaan dalam rangka dekonsentrasi merupakan pelaksanaan kebijakan nasional di Daerah
- c) Kebijakan pelaksanaan dalam rangka tugas pembantuan (medebewind) merupakan pelaksanaan tugas Pemerintah Pusat di Daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah Daerah

SISTEM, PROSES, DAN SIKLUS KEBIJAKAN PUBLIK

1. Sistem Kebijakan Publik

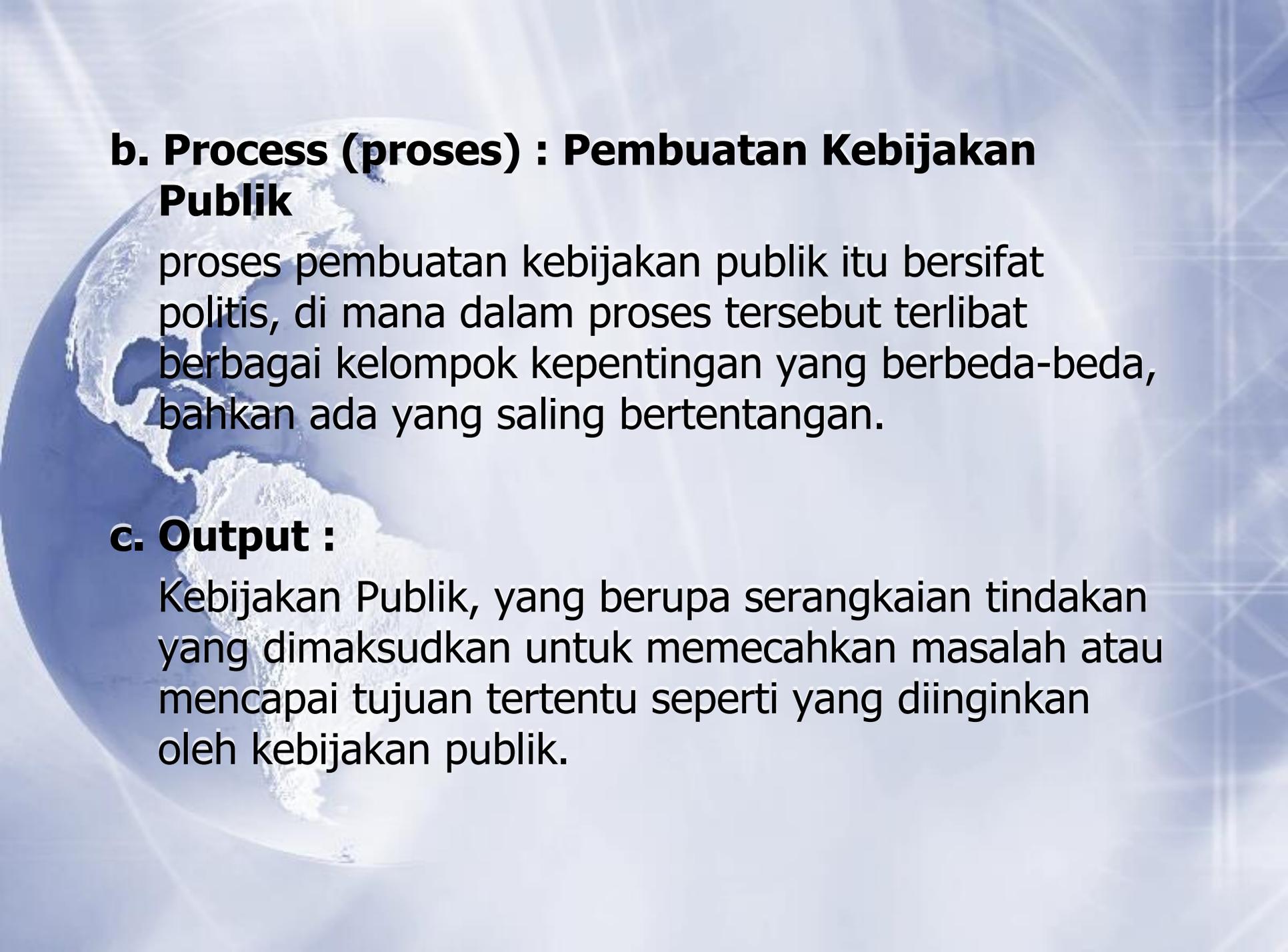
Sistem kebijakan publik, menurut Mustopadidjaja AR (Bintoro Tjokromidjojo dan Mustopadidjaja AR, 1988), adalah:

keseluruhan pola kelembagaan dalam pembuatan kebijakan publik yang melibatkan hubungan di antara 4 elemen (unsur), yaitu masalah kebijakan publik, pembuatan kebijakan publik, kebijakan publik dan dampaknya terhadap kelompok sasaran (target groups).

Sistem kebijakan publik dikenal adanya unsur-unsur : Input -> Proses -> Output.

a. Input : Masalah Kebijakan Publik

Masalah kebijakan publik ini timbul karena adanya faktor lingkungan kebijakan publik yaitu suatu keadaan yang melatar belakangi atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya “ masalah kebijakan publik” tersebut, yang berupa tuntutan-tuntutan, keinginan-keinginan masyarakat atau tantangan dan peluang, yang diharapkan segera diatasi melalui suatu kebijakan publik. Masalah itu dapat juga timbul justru karena dikeluarkannya suatu kebijakan publik baru.

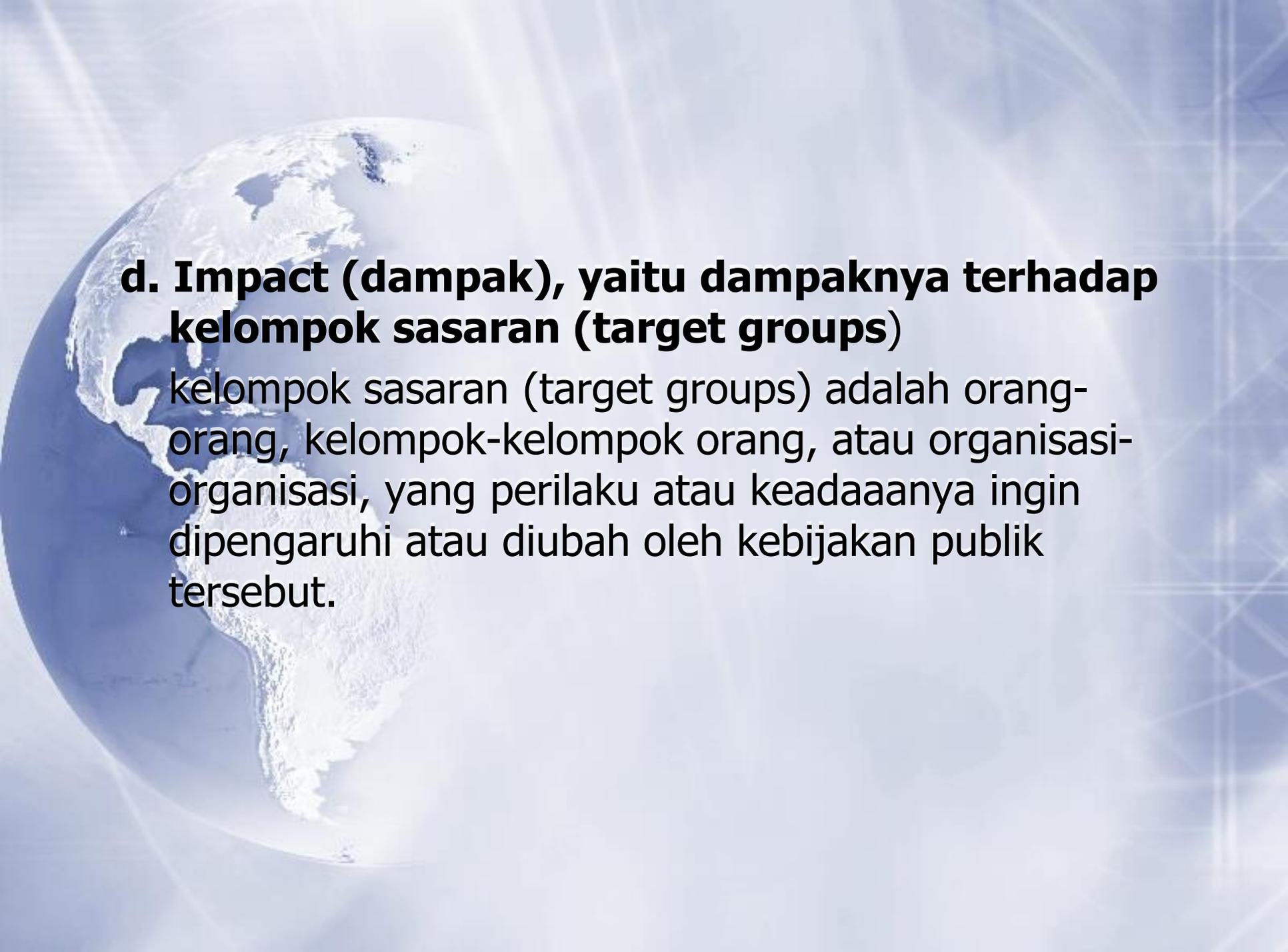


b. Process (proses) : Pembuatan Kebijakan Publik

proses pembuatan kebijakan publik itu bersifat politis, di mana dalam proses tersebut terlibat berbagai kelompok kepentingan yang berbeda-beda, bahkan ada yang saling bertentangan.

c. Output :

Kebijakan Publik, yang berupa serangkaian tindakan yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah atau mencapai tujuan tertentu seperti yang diinginkan oleh kebijakan publik.



d. Impact (dampak), yaitu dampaknya terhadap kelompok sasaran (target groups)

kelompok sasaran (target groups) adalah orang-orang, kelompok-kelompok orang, atau organisasi-organisasi, yang perilaku atau keadaanya ingin dipengaruhi atau diubah oleh kebijakan publik tersebut.

2. Proses Kebijakan Publik

a. Perumusan Kebijakan Publik

Tahap ini mulai dari perumusan masalah sampai dengan dipilihnya alternatif untuk direkomendasikan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.

b. Implementasi Kebijakan Publik

Setelah kebijakan publik disahkan oleh pejabat yang berwenang, maka kemudian kebijakan publik tersebut diimplementasikan (dilaksanakan)

Mengenai implementasi kebijakan publik, Mustopadidjaja AR (Bintoro Tjokromidjojo dan Mustopadidjaja AR, 1988), mengemukakan bahwa dilihat dari implementasinya, ada tiga bentuk kebijakan publik, yaitu :

1) Kebijakan langsung

yaitu kebijakan yang pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah sendiri. Misalnya : INPRES SD

2) Kebijakan tidak langsung

yaitu kebijakan yang pelaksanaannya tidak dilakukan oleh pemerintah. Dengan demikian, dalam hal ini pemerintah hanya mengatur saja.

misalnya : kebijakan pemerintah tentang Investasi Asing.

3) Kebijakan campuran

yaitu kebijakan yang pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah dan bukan pemerintah (swasta)



c. Monitoring Kebijakan Publik

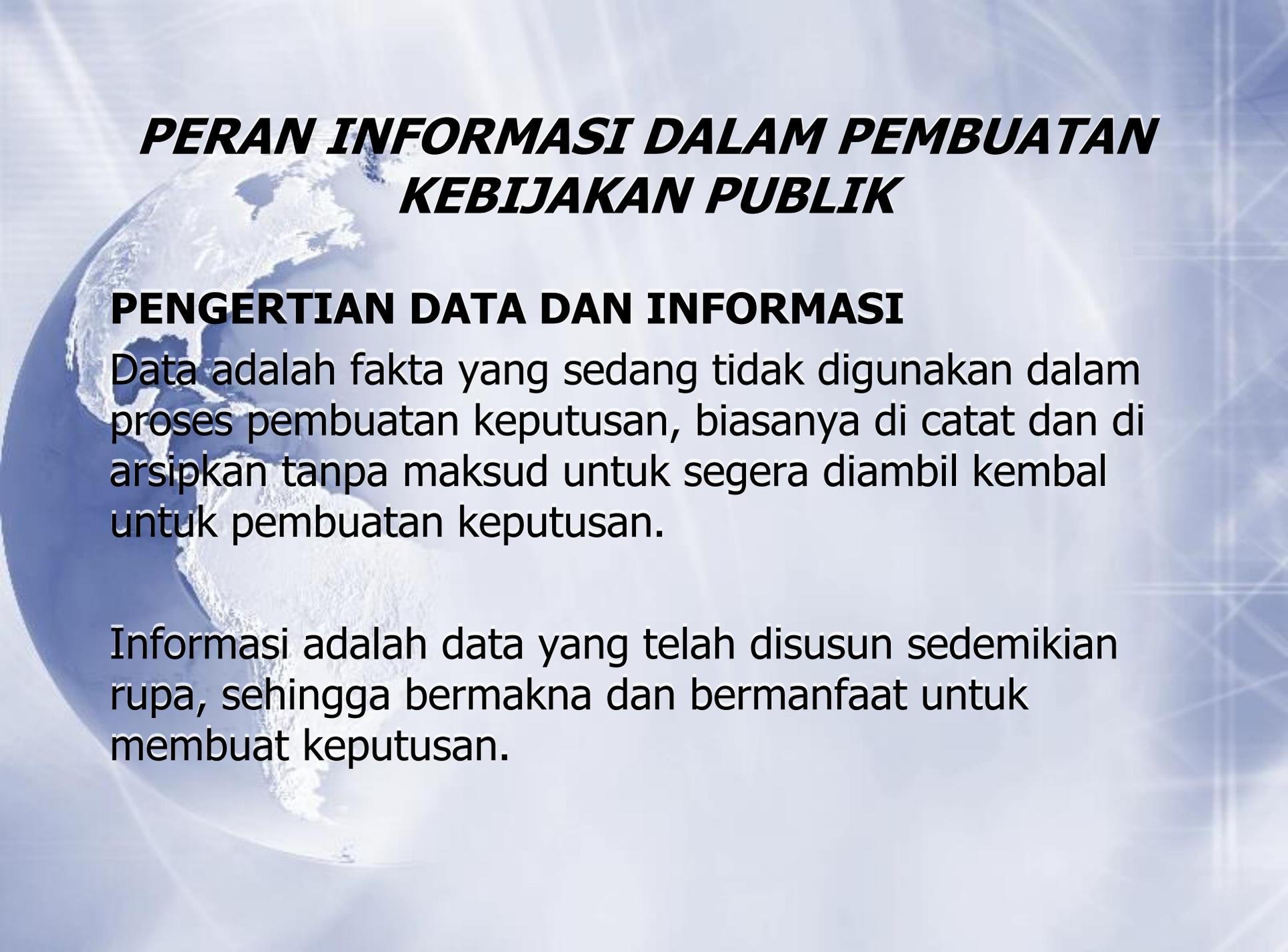
Monitoring kebijakan publik adalah proses kegiatan pengawasan terhadap implementasi kebijakan, yaitu untuk memperoleh informasi tentang seberapa jauh tujuan kebijakan itu tercapai. (Hogwood and Gunn, 1989).

d. Evaluasi Kebijakan Publik.

Evaluasi kebijakan publik itu bertujuan untuk menilai apakah perbedaan sebelum dan setelah kebijakan itu diimplementasikan, yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah diberlakukannya suatu kebijakan.

3. Siklus Kebijakan Publik





PERAN INFORMASI DALAM PEMBUATAN KEBIJAKAN PUBLIK

PENGERTIAN DATA DAN INFORMASI

Data adalah fakta yang sedang tidak digunakan dalam proses pembuatan keputusan, biasanya di catat dan di arsipkan tanpa maksud untuk segera diambil kembali untuk pembuatan keputusan.

Informasi adalah data yang telah disusun sedemikian rupa, sehingga bermakna dan bermanfaat untuk membuat keputusan.

Syarat-syarat informasi yang baik

Parker (Kumorotomo dan Agus Margono,1994) mengemukakan sebagai berikut :

a. Ketersediaan (availability)

Syarat pokok bagi informasi adalah tersedianya itu sendiri. Informasi harus dapat diperoleh bagi yang hendak memanfaatkannya.

b. Mudah dipahami

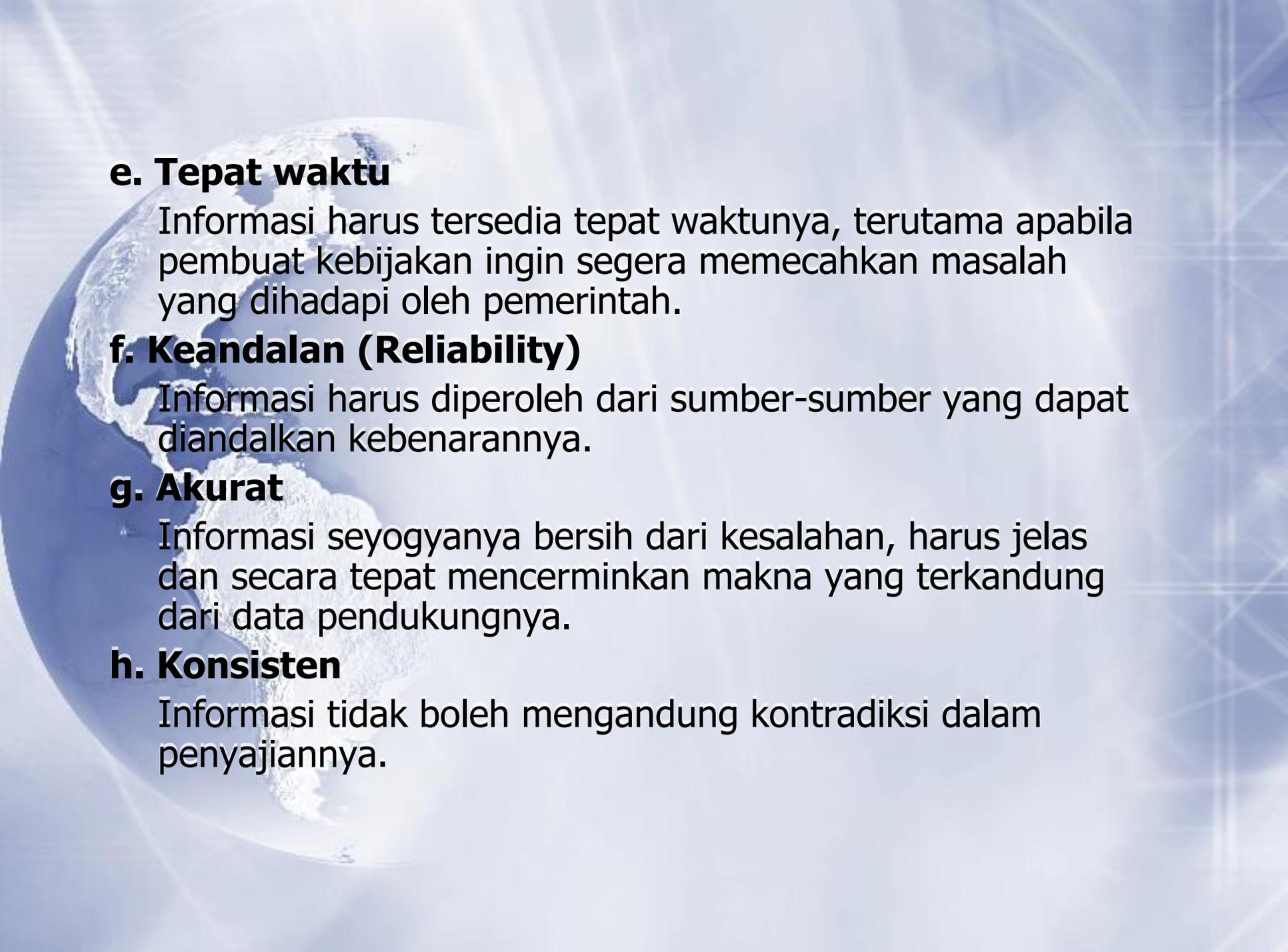
Informasi harus mudah dipahami oleh pembuat kebijakan.

c. Relevan

Informasi yang diperlukan harus benar-benar relevan dengan permasalahannya.

d. Bermanfaat

Terkait dengan syarat relevansi, informasi harus bermanfaat bagi pembuat kebijakan.



e. Tepat waktu

Informasi harus tersedia tepat waktunya, terutama apabila pembuat kebijakan ingin segera memecahkan masalah yang dihadapi oleh pemerintah.

f. Keandalan (Reliability)

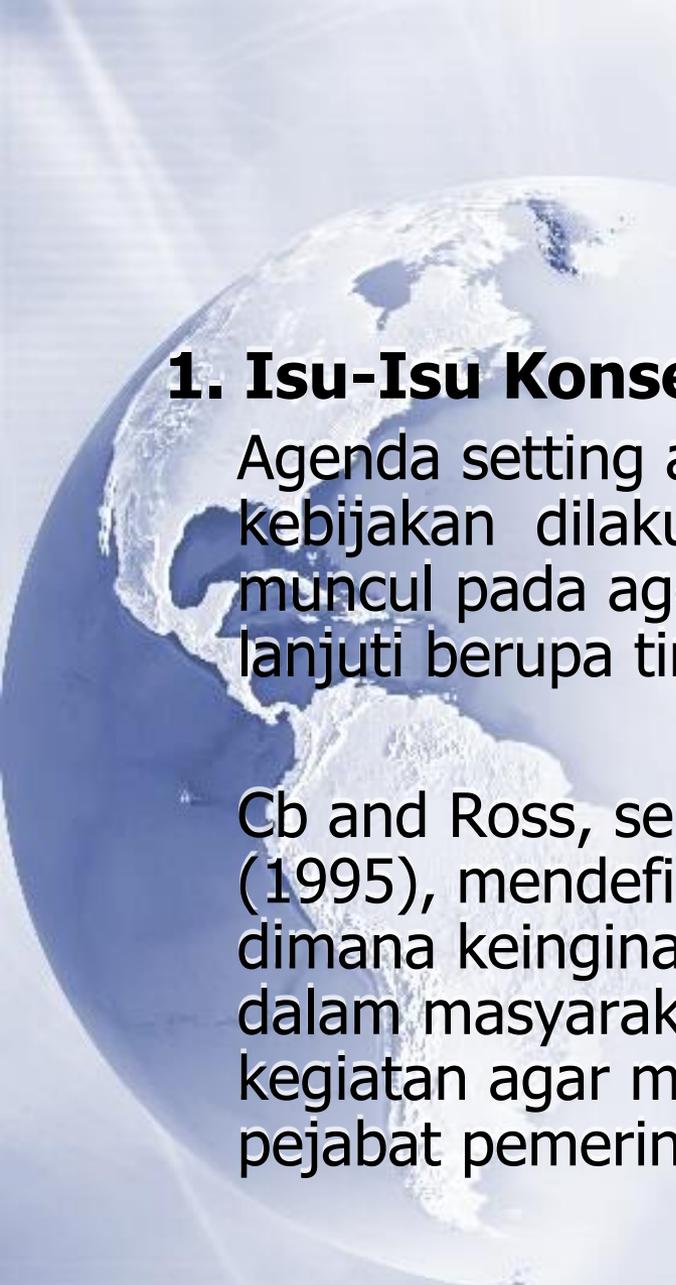
Informasi harus diperoleh dari sumber-sumber yang dapat diandalkan kebenarannya.

g. Akurat

Informasi seyogyanya bersih dari kesalahan, harus jelas dan secara tepat mencerminkan makna yang terkandung dari data pendukungnya.

h. Konsisten

Informasi tidak boleh mengandung kontradiksi dalam penyajiannya.

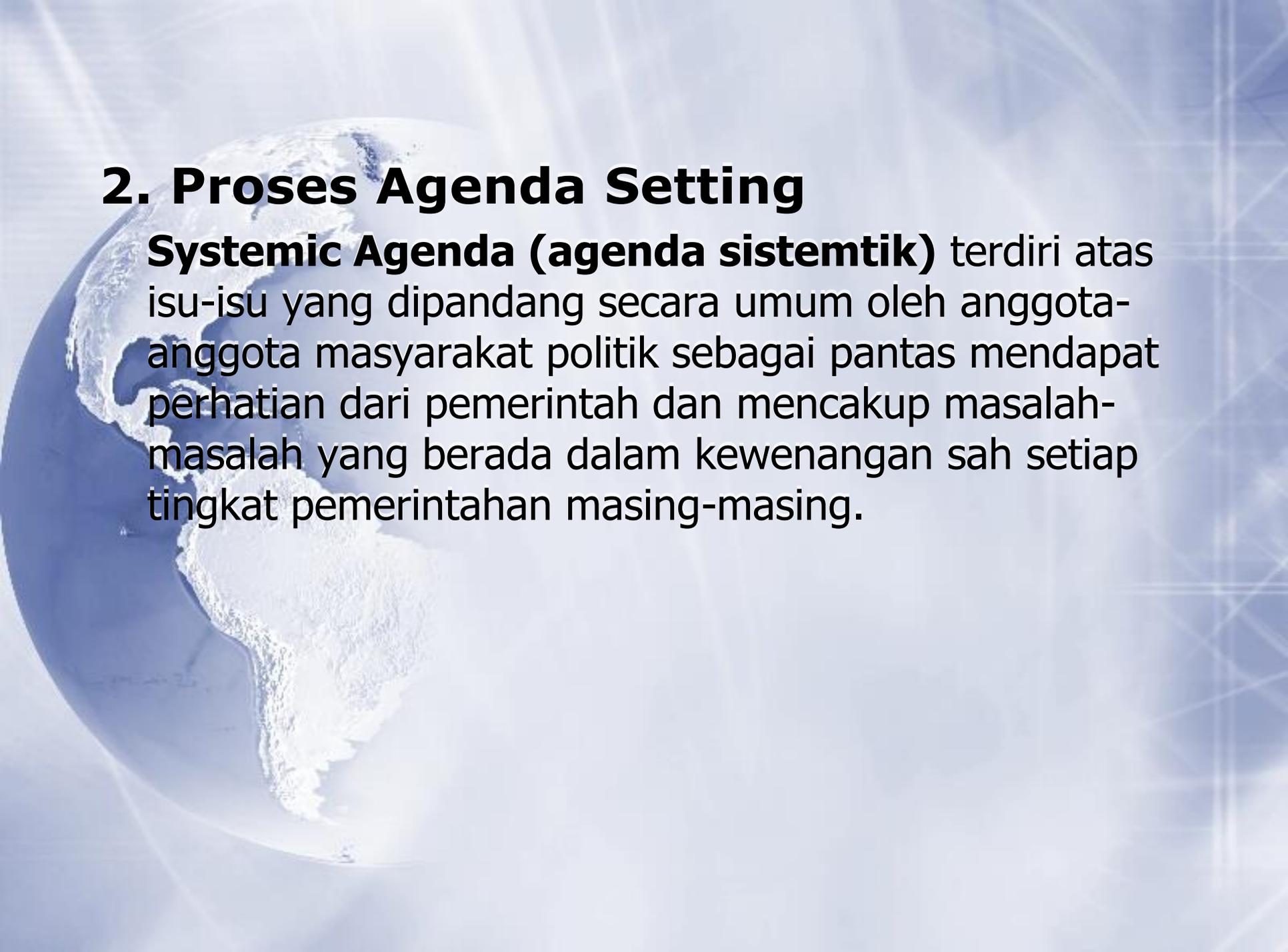


AGENDA SETTING

1. Isu-Isu Konseptual

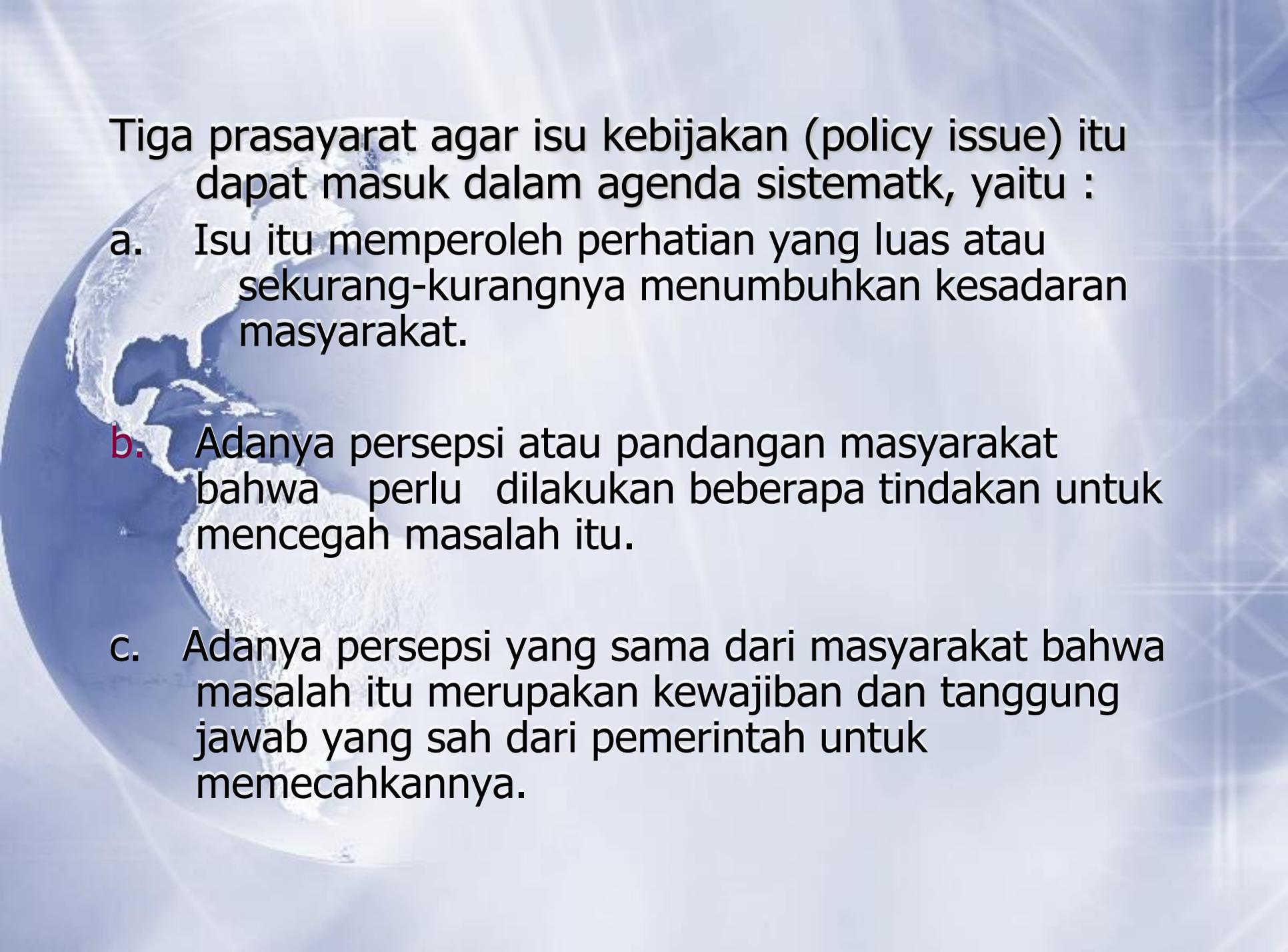
Agenda setting adalah suatu tahap sebelum perumusan kebijakan dilakukan, yaitu bagaimana isu-isu (issues) itu muncul pada agenda pemerintah yang perlu ditindaklanjuti berupa tindakan-tindakan pemerintah.

Cb and Ross, seperti dikutip oleh Howeltt and Ramesh (1995), mendefinisikan agenda setting sebagai "Proses dimana keinginan-keinginan dari berbagai kelompok dalam masyarakat diterjemahkan ke dalam butir-butir kegiatan agar mendapat perhatian serius dari pejabat-pejabat pemerintah"



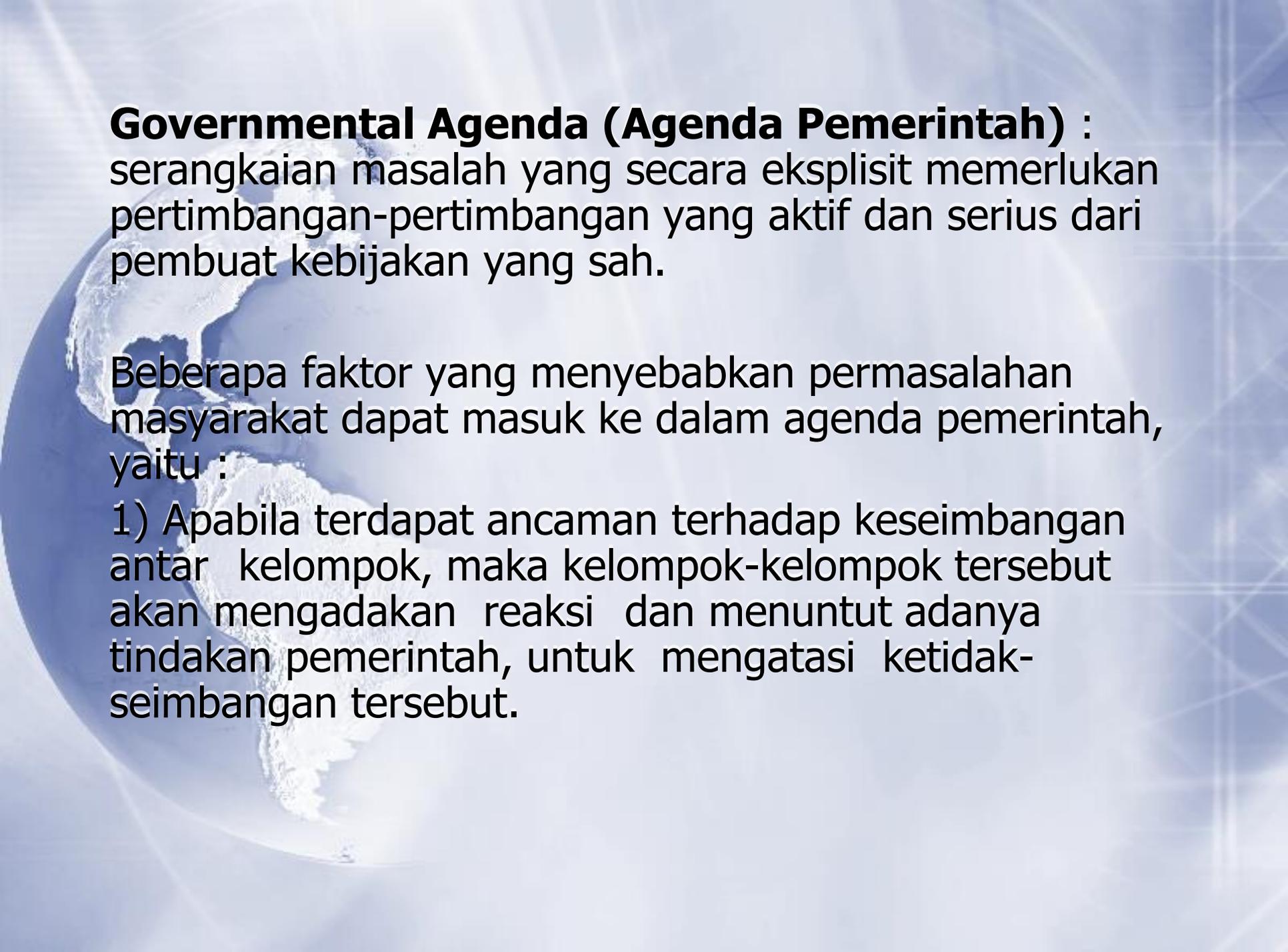
2. Proses Agenda Setting

Systemic Agenda (agenda sistemtik) terdiri atas isu-isu yang dipandang secara umum oleh anggota-anggota masyarakat politik sebagai pantas mendapat perhatian dari pemerintah dan mencakup masalah-masalah yang berada dalam kewenangan sah setiap tingkat pemerintahan masing-masing.



Tiga prasyarat agar isu kebijakan (policy issue) itu dapat masuk dalam agenda sistematis, yaitu :

- a. Isu itu memperoleh perhatian yang luas atau sekurang-kurangnya menumbuhkan kesadaran masyarakat.
- b. Adanya persepsi atau pandangan masyarakat bahwa perlu dilakukan beberapa tindakan untuk mencegah masalah itu.
- c. Adanya persepsi yang sama dari masyarakat bahwa masalah itu merupakan kewajiban dan tanggung jawab yang sah dari pemerintah untuk memecahkannya.

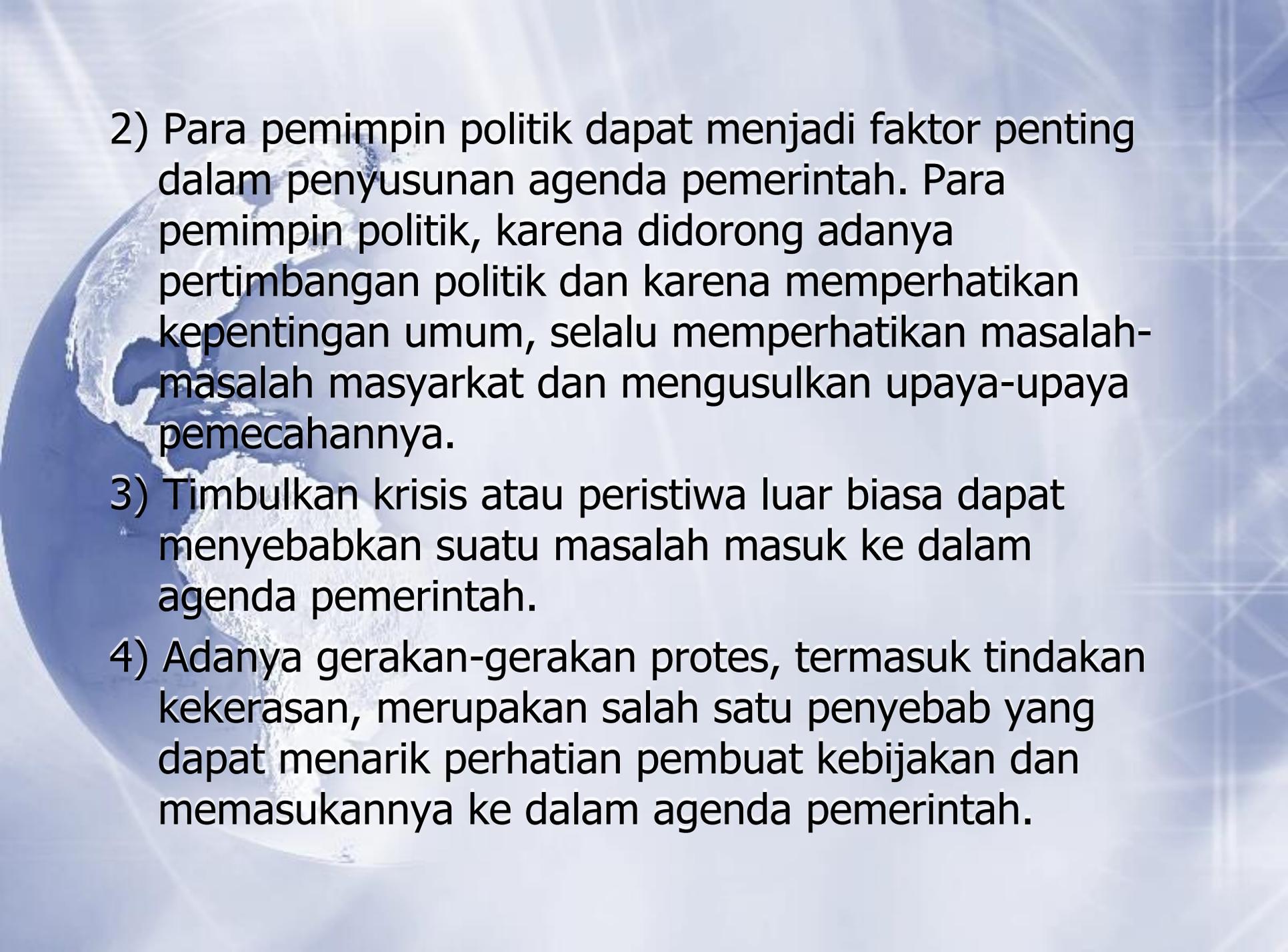


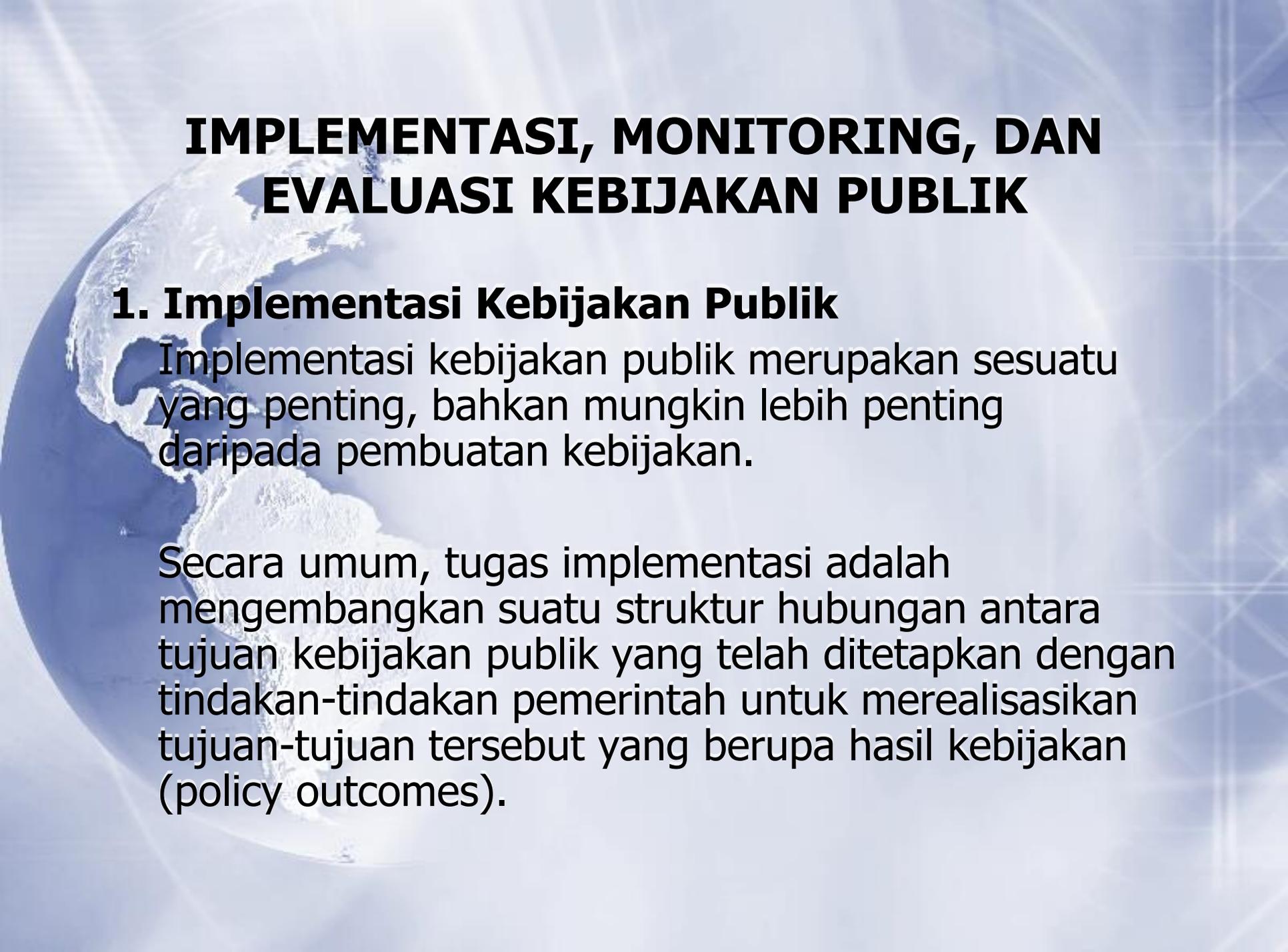
Governmental Agenda (Agenda Pemerintah) :

serangkaian masalah yang secara eksplisit memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang aktif dan serius dari pembuat kebijakan yang sah.

Beberapa faktor yang menyebabkan permasalahan masyarakat dapat masuk ke dalam agenda pemerintah, yaitu :

- 1) Apabila terdapat ancaman terhadap keseimbangan antar kelompok, maka kelompok-kelompok tersebut akan mengadakan reaksi dan menuntut adanya tindakan pemerintah, untuk mengatasi ketidakseimbangan tersebut.

- 
- 2) Para pemimpin politik dapat menjadi faktor penting dalam penyusunan agenda pemerintah. Para pemimpin politik, karena didorong adanya pertimbangan politik dan karena memperhatikan kepentingan umum, selalu memperhatikan masalah-masalah masyarakat dan mengusulkan upaya-upaya pemecahannya.
 - 3) Timbulkan krisis atau peristiwa luar biasa dapat menyebabkan suatu masalah masuk ke dalam agenda pemerintah.
 - 4) Adanya gerakan-gerakan protes, termasuk tindakan kekerasan, merupakan salah satu penyebab yang dapat menarik perhatian pembuat kebijakan dan memasukannya ke dalam agenda pemerintah.



IMPLEMENTASI, MONITORING, DAN EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK

1. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik merupakan sesuatu yang penting, bahkan mungkin lebih penting daripada pembuatan kebijakan.

Secara umum, tugas implementasi adalah mengembangkan suatu struktur hubungan antara tujuan kebijakan publik yang telah ditetapkan dengan tindakan-tindakan pemerintah untuk merealisasikan tujuan-tujuan tersebut yang berupa hasil kebijakan (policy outcomes).

2. Monitoring Kebijakan Publik

Monitoring adalah proses kegiatan pengawasan terhadap implementasi kebijakan yang meliputi keterkaitan antara implementasi dan hasil-hasilnya (out-comes) (Hogwood and Gunn, 1989).

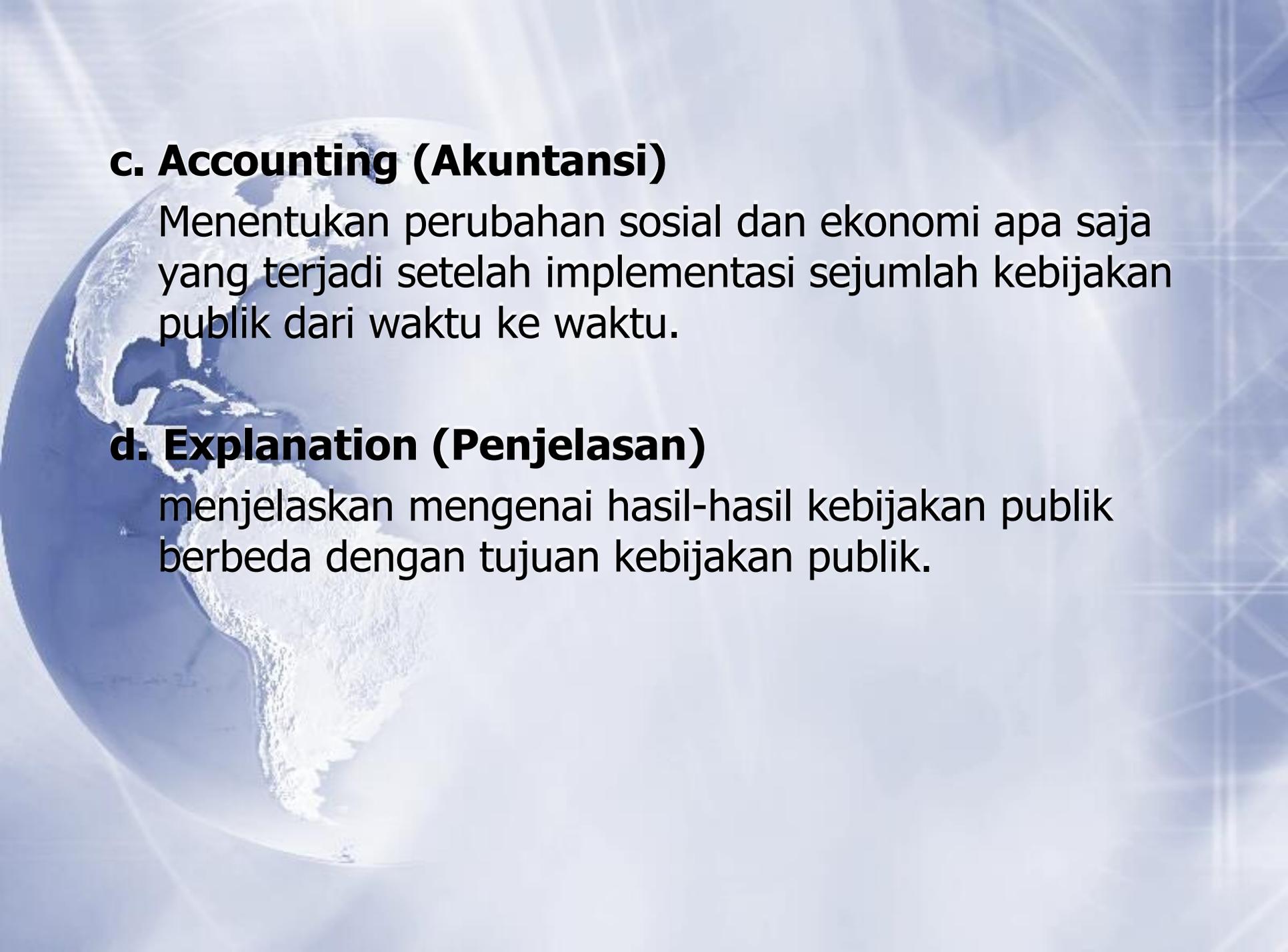
William N. Dunn (1994), menjelaskan bahwa monitoring mempunyai beberapa tujuan, yaitu :

a. **Compliance (kesesuaian/kepatuhan)**

Menentukan apakah implementasi kebijakan tersebut sesuai dengan standard dan prosedur yang telah ditentukan.

b. **Auditing (pemeriksaan)**

menentukan apakah sumber-sumber/pelayanan kepada kelompok sasaran (target groups) memang benar-benar sampai kepada mereka.



c. Accounting (Akuntansi)

Menentukan perubahan sosial dan ekonomi apa saja yang terjadi setelah implementasi sejumlah kebijakan publik dari waktu ke waktu.

d. Explanation (Penjelasan)

menjelaskan mengenai hasil-hasil kebijakan publik berbeda dengan tujuan kebijakan publik.

3. Evaluasi Kebijakan Publik

- ✧ Evaluasi kebijakan sebagai suatu pengkajian secara sistematis dan empiris terhadap akibat-akibat dari suatu kebijakan dan program pemerintah yang sedang berjalan dan kesesuaiannya dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan tersebut.
- ✧ Kesulitan dalam evaluasi kebijakan, antara lain adalah tujuan-tujuan dalam kebijakan publik jarang dilakukan (ditulis) secara cukup jelas, dalam arti seberapa jauh tujuan-tujuan kebijakan publik itu harus dicapai. Pengembangan ukuran-ukuran yang tepat dan dapat diterima semua pihak sangat sulit dilakukan (Howlett dan Ramesh, 1995)

Howlett dan Ramesh (1995), mengemukakan tentang beberapa bentuk evaluasi kebijakan, yaitu :

a. Administrasi Evaluation (evaluasi Administratif)

Evaluasi administratif pada umumnya dibatasi pada pengkajian tentang efisiensi penyampaian pelayanan pemerintah dan penentuan, apakah penggunaan dana oleh pemerintah sesuai dengan tujuan yang telah dicapai.

b. Judicial Evaluation (Evaluasi Yudisial)

Evaluasi yudisial mengadakan pengkajian apakah kebijakan yang dibuat pemerintah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, apakah tidak melanggar HAM dan hak-hak individu.

c. Political Evaluation (Evaluasi Politis)

Evaluasi politis masuk dalam proses kebijakan hanya pada waktu-waktu tertentu. Misalnya, pemilihan umum.

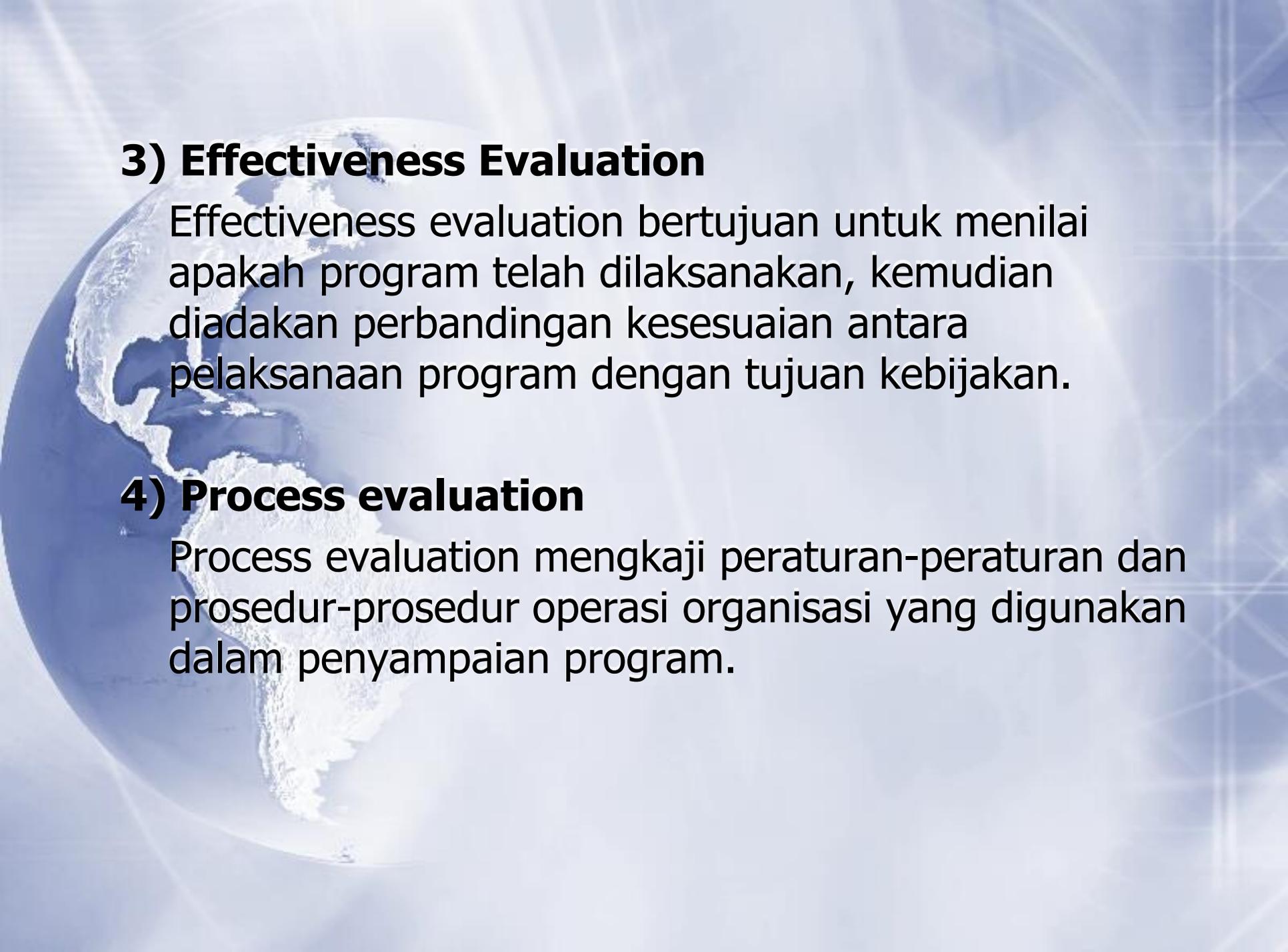
Beberapa Bentuk Evaluasi Administratif, yaitu :

1) Effort Evaluation

Effort evaluation bertujuan untuk mengukur kuantitas inputs (masukan) program, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Inputs itu adalah personil, ruang kantor, komunikasi, transportasi, dan lain-lain, yang dihitung berdasarkan biaya yang digunakan.

2) Performance evaluation

Performance evaluation mengkaji outputs program. Contoh, outputs rumah sakit : tempat tidur yang tersedia, jumlah pasien.



3) Effectiveness Evaluation

Effectiveness evaluation bertujuan untuk menilai apakah program telah dilaksanakan, kemudian diadakan perbandingan kesesuaian antara pelaksanaan program dengan tujuan kebijakan.

4) Process evaluation

Process evaluation mengkaji peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur operasi organisasi yang digunakan dalam penyampaian program.



Terima kasih